

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Adami Chazawi, 2019. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

_____, 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarako, 2024. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Burhan, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Edita Elda, 2021. *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Eka Nam Sihombing, 2020. *Politik Hukum*. Sumatera Utara: Enam Media.

Elwi Danil, 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Evi Hartanti, 2014. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Febby Mutiara Nelson, 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Hanafi Amrani, 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.

Joko Sriwidodo, 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Yogyakarta: Kapel Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Leden Marpaung, 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Siddiq Armia, 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.

Ruslan Renggong, 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana.

Shinta Agustina, 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books.

Suteki dan Galang Taufani, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Topo Susanto, 2021. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasasi);

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

C. JURNAL

Ahmad Bahiej, 2006. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 5 No. 2.

Ali Imron, 2016. "Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta Advokat dihubungkan dengan Penegakan Hukum pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1.

Anita Zulfiani, Agung Probohudono, dan Khresna Bayu Sangka, 2023. "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi pada Sektor Swasta." *UNES Law Review*, Vol. 5, Issue 4.

Brian Lemuel Rachman, 2018. "Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia." *Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 2.

Calvin dan Noor Azizah, 2024. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional." *Jurnal Mutawasith*, Vol. 7, No. 1, hlm. 25.

Dwi Astrianti Defretes, Kristforus Laga Kleden, 2022. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 7, No. 2.

Edward Omar Sharif Hiarij, 2019. "United Nations Convention Against Corruption." *Mimbar Hukum*, Vol. 31 No. 1.

_____, 2021. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialis Systematis and Tax Criminal Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1.

Edita Elda, 2019. "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Lex Lata*, Vol. 1, No. 2.

Ewapriliyandi Fahmi Saputra dan Hery Firmansyah, 2023. "Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaruan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional." *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2.

Firzatul Rima Fitriana, Nuryanto A. Daim, 2025. "Peran PPATK dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Law and Humanity*, Vol. 1, No. 23.

M. Gafur Aditya H, Siregar, Agung Perdana M. Sitohang, Mutiara Azmi Hayati, dan Rakhman Farisi, 2024. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 11, No. 2.

Mahmud Mulyadi, 2021. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 1.

Muhammad Fadhil, Taufik Rachman, dan Ahsan Yunus, 2022. "Kontruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa*, Vol. 30, No. 1.

Nafi Mubarak, 2024. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 27 No. 1.

Sabrina Hidayat, dkk, 2023. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)." *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 2.

Septinus Arui, Donny Eddy SAM Karauwan, dan Achmad Junaedy, 2024. "Evaluasi Kinerja Lembaga Anti-Korupsi dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014. "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1 No. 1.

D. SKIRPSI/TESIS

Muchamad Rosyidin, 2009. *Kedudukan dan Peran KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Studi Hubungan KPK dan Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi)*. Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nanda Novia Putri, 2019. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK.)*. Skripsi Sarjana Universitas Lampung, Lampung.

E. INTERNET

Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, 2021. "Konsepsi Ajaran *Logische Specialiteit* dan *Systematische Specialiteit*," <https://pn-pontianak.go.id/wp-content/uploads/2021/06/H.-Akhmad-Fijarsyah-Joko-Sutrisno-S.H.-M.H..pdf>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 13.20 WIB.

Ashari Setya Marwah Adli, 2025, "Lembaga yang Berwenang Hitung Kerugian dalam Tipikor Pasca KUHP Nasional", <https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-yang-berwenang-hitung-kerugian-dalam-tipikor-pasca-kuhp-nasional-lt67d25a2748e20/?page=1>, dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 20.50 WIB.

Chairul Huda, 2025. "Kuliah Umum Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," <https://www.youtube.com/live/jo-dlPnmfLE?si=DrsdJJHLieoBn29i>, dikunjungi pada 06 Juni 2025, pukul 13.10 WIB.

Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, 2025. "Statistik dan Data Kasus Korupsi," <https://tipidkorpori.info/laporan/>, dikunjungi pada 21 Januari 2025, pukul 11.30 WIB.

Elwi Danil, 2025. "FGD Fakultas Hukum Unand dengan Komisi Kejaksaan RI dan Kejaksaan Tinggi Sumbar,"

https://www.youtube.com/watch?v=OlRuRwG_rSs&t=6355s, dikunjungi pada tanggal 8 Juni 2025, pukul 18.19 WIB.

Jaksa Indonesia, 2024. "*Rumusan Pasal-Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*," <https://rumahadhyaksa.com/rumusan-pasal-pasal-tindak-pidana-korupsi-dalam-kuhp-baru-undang-undang-nomor-1-tahun-2023/>, dikunjungi pada tanggal 8 Mei 2025, pukul 19.50 WIB.

Jose Imanuel, 2024, "Peran PPATK dalam Melacak Aliran Dana Korupsi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-ppatk-dalam-melacak-aliran-dana-korupsi-lt6720fbc16538a/>, dikunjungi pada tanggal 02 Juli 2015, pukul 20.00 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025. "*Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi*" <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 20.00 WIB.

_____, 2025. "Sekilas KPK," <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, dikunjungi pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 12.25 WIB.

_____, 2025. "*Statistik SPDP Polri dan Kejaksaan*," <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>, dikunjungi pada tanggal 01 Juli 2025, pukul 12.35 WIB.

_____, 2025. "*Ikhtisar Kepatuhan LHKPN*," <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>, dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 20.00 WIB.

Nabilla Tashandra, 2017. *"Pidana Korupsi Diatur dalam KUHP, Ini Alasan Menkumham,"*

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/05404771/pidana.korupsi.diatur.dalam.kuhp.ini.alasan.menkumham>, dikunjungi pada

[ana.korupsi.diatur.dalam.kuhp.ini.alasan.menkumham](https://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/05404771/pidana.korupsi.diatur.dalam.kuhp.ini.alasan.menkumham), dikunjungi pada tanggal 27 Februari 2025, pukul 11.56 WIB.

Pujiyono Suwandi, 2025. *"FGD Fakultas Hukum Unand dengan Komisi Kejaksaan RI dan Kejaksaan Tinggi Sumbar,"*

https://www.youtube.com/watch?v=OlRuRwG_rSs&t=6355s, dikunjungi

pada tanggal 30 Juni 2025, pukul 12.29 WIB.

Renata Christha Auli, 2024. *"Jenis-Jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia,"*

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/)

[hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/), dikunjungi pada tanggal 10 Mei 2025, pukul 21.00 WIB.

Tim Hukumonline, 2024. *"Pengertian Politik Hukum Pidana Menurut Para Ahli,"* [https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b?page=all)

[pidana-lt62565ec91601b?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-politik-hukum-pidana-lt62565ec91601b?page=all), dikunjungi pada tanggal 2 November 2024, pukul 20.15 WIB.

_____, 2024. *"Tahapan dan Ruang Lingkup Politik Hukum Pidana,"*

[https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-pidana-lt65eacd30c87bc/?page=all)

[pidana-lt65eacd30c87bc/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/ruang-lingkup-politik-hukum-pidana-lt65eacd30c87bc/?page=all), dikunjungi pada tanggal 2 November 2024, pukul 20.28 WIB.

_____, 2025. *"Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior,"*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i-->

[ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/](#),

dikunjungi pada tanggal 27 Mei 2025, pukul 12.25 WIB.

Transparency Internasional, 2025. “*Corruption Perceptions Index*,”

<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, dikunjungi pada 28

April 2025, pukul 19.00 WIB.

_____, 2025. “*Corruption Perceptions Index*,”

<https://www.transparency.org/en/countries>, dikunjungi pada 28 April 2025,

pukul 19.10 WIB.

World Justice Project of Law Index, 2025. “*Indonesia Overall Score 2024*,”

<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2024/Indonesia/>,

dikunjungi pada 21 Januari 2025, pukul 13.00 WIB.

F. DOKUMEN LAIN

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI, 2015. *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI.

Catatan Rapat Tim Perumus Komisi III DPR RI Dalam Rangka Pembahasan RUU

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada tanggal 30 Mei 2018,

pukul 15.30 WIB - 16.55 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015. *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial*

Korupsi. Jakarta Selatan: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan

Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2023. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 20 Maret 2025.

Risalah Panitia Kerja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah, pada tanggal 15 September 2016, pukul 22.30 WIB.

Risalah Panitia Kerja KUHP Komisi III DPR RI dengan Pemerintah, Pembahasan DIM RUU KUHP Buku 2, pada tanggal 26 Januari 2016, pukul 14.20 WIB – 16.55 WIB.

Risalah Panitia Kerja KUHP Komisi III DPR RI dengan Pemerintah, Pembahasan DIM RUU KUHP Buku 2, pada tanggal 09 Februari 2017, pukul 14.00 WIB – 23.30 WIB.

Risalah Rapat Panitia Kerja RUU tentang KUHP dengan Pemerintah, pada tanggal 15 September 2019, pukul 11.25 WIB – 22.21 WIB.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

G. KAMUS

Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.